ANALISIS DAN IMPLIKASI KOREKSI EKUITAS PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH : STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister

SELLY WIJAYANTI

NIM. B2092232001

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Selly Wijayanti
NIM	: B2092232001
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: Magister Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik (ASP)
Judul Tesis	: Analisis dan Implikasi Koreksi Ekuitas Pada Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir)

Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnua menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tesis dengan judul tersebut di atas.

Pontianak, 2025



Selly Wijayanti
NIM. B2092232001

PERTANGGUNGJAWABAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Selly Wijayanti
NIM	: B2092232001
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik (AS)
Judul Tesis	: Analisis dan Implikasi Koreksi Ekuitas Pada Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa seluruh isi tesis saya adalah murni hasil karya saya pribadi, tanpa menjiplak tulisan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata tulisan saya ini menjiplak hasil karya tulisan orang lain, maka saya bersedia **digugurkan hak saya menyandang gelar Magister Akuntansi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Pontianak, 2025



Selly Wijayanti
NIM. 2292232001

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul :
Analisis dan Implikasi Koreksi Ekuitas Pada Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya ini diajukan oleh :

Nama	: Selly Wijayanti
NIM	: B2092232001
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: Magister Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik (ASP)
Tanggal Ujian	: 1 Juli 2025

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan lulus oleh Majelis Penguji dalam Tesis dan Komprehensif untuk memperoleh gelar Magister.

MAJELIS PENGUJI

Majelis Penguji	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
Pembimbing I	Dr.Haryono,SE,M.Si.,AK., CA,CPA, ASEANCPA NIP. 196306301990021001	04 Juli 2025	
Pembimbing II	Dr. Sari Rusmita, SE,MM NIP. 198109162006042001	04 Juli 2025	
Penguji I	Dr. Juanda Astarani, SE, M.Sc, CSRS, ACPA, CfrA, CMA NIP. 198207192005011001	04 Juli 2025	
Penguji II	Rusliyawati, SE, M.Si, Ak, CA NIP. 197901272002122002	04 Juli 2025	

Pontianak, 07 Juli 2025

Mengetahui
Koordinator Program Studi
Akuntansi FEB UNTAN

Elok Heniwati, SE, M.Si, Ak, Ph.D, CA
NIP. 197402122000122001

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Analisis dan Implikasi Koreksi Ekuitas Pada Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya" secara baik. Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister akuntansi (S2) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis sadar bahwa penyelesaian tesis ini tidak terpisahkan dari pertolongan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
2. Bapak Dr. Jumhur,S.E,M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
3. Bapak Dr. Haryono,SE, M.Si., AK., CA, CPA, ASEAN CPA, CFrA selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dari awal hingga akhir perkuliahan dan penyusunan tesis saya.
4. Ibu Dr. Sari Rusmita, SE, MM sebagai Dosen Pembimbing Kedua. Terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan dari awal hingga akhir penulisan tesis saya.
5. Bapak Dr. Juanda Astarani, SE, M.Sc, CSRS, ACPA, CfrA, CMA sebagai Dosen Penguji Pertama. Terima kasih atas masukan dan revisi yang telah diberikan pada tesis ini.
6. Ibu Rusliyawati, SE, M.Si, Ak, CA. sebagai Dosen Penguji Kedua. Terima kasih atas masukan dan revisi yang telah diberikan pada tesis ini.
7. Ibu Elok Heniwati, S.E., M.Si., Ak.,C.A., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

8. Ibu Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., AK., CA, CMA, CPA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
9. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Terima kasih atas ilmu, arahan dan bimbingan yang telah diberikan dari awal hingga akhir perkuliahan.
10. Seluruh staff administrasi dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Terima kasih atas bantuan dan arahan selama proses pengerjaan tesis ini.
11. Seluruh keluarga penulis yang memberikan dukungan dan semangat selama menjalani kehidupan perkuliahan.
12. Seluruh informan penelitian yang terlibat di penelitian ini, khususnya informan yang bertugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan informasi dan bantuan.
13. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Program Studi Akuntansi Angkatan XX khususnya teman-teman Kelas Weekend. Terima kasih sudah menjadi teman serta saudara yang solid dalam menjalani keseharian di kampus.
14. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Penulis secara tulus mengakui bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, dengan itu peneliti membutuhkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi seluruh pembaca dan juga akademisi.

Pontianak, Juni 2025

Selly Wijayanti
NIM. 2092232001

ANALISIS DAN IMPLIKASI KOREKSI EKUITAS PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH : STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Selly Wijayanti
email : b2092232001@student.untan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koreksi ekuitas dalam laporan keuangan pemerintah daerah serta implikasinya terhadap penyajian informasi keuangan yang andal dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Studi dilakukan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Penelitian ini meneliti 94 transaksi koreksi ekuitas yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), dengan fokus pada kepatuhan terhadap SAP, pengukuran materialitas pada tingkat laporan dan akun, serta implikasi dalam penyajiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 49 transaksi yang memenuhi definisi kesalahan sebagaimana diatur dalam PSAP 10 Revisi 2020, sementara 45 transaksi lainnya tidak memenuhi definisi kesalahan. Hasil pengukuran materialitas dengan pendekatan kuantitatif menunjukkan bahwa LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 mengandung salah saji material pada tingkat laporan keuangan dan salah saji material pada tingkat akun neraca yaitu pada akun penyertaan modal pemerintah, akumulasi penyusutan dan utang jangka pendek. Konsep pengendalian atas transaksi koreksi ekuitas menunjukkan bahwa pengendalian detektif dan korektif telah berjalan cukup baik melalui mekanisme berjenjang, rekonsiliasi internal dan pemanfaatan sistem akuntansi. Namun, masih lemah pada pengendalian preventif karena identifikasi potensi koreksi baru dilakukan menjelang akhir proses pelaporan.

Kata kunci: Koreksi Ekuitas, Materialitas, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, SAP

ANALYSIS AND IMPLICATIONS OF EQUITY CORRECTIONS ON THE PRESENTATION OF REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS : A STUDY ON KUBU RAYA DISTRICT GOVERNMENT

Selly Wijayanti
email: b2092232001@student.untan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze equity corrections in the financial statements of regional governments and their implications for presenting reliable financial information in accordance with Government Accounting Standards/*Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).* The research was conducted using a qualitative case study approach on the Financial Statements /*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)* of the Kubu Raya Regency Government of Fiscal Year 2022. The study examined 94 equity correction transactions disclosed in the Notes to the Financial Statements/*Catatan atas Laporan Keuangan (CALK),* focusing on compliance with SAP, measurement of materiality at both the financial statement and account levels, and the implications for financial reporting. Findings indicate that 49 transactions meet the definition of errors as outlined in PSAP 10 (2020 Revision), while the remaining 45 transactions do not qualify as such. The quantitative materiality assessment revealed material misstatements at both the financial statement level and within specific balance sheet accounts, including government investment accounts, accumulated depreciation, and short-term liabilities. In terms of control mechanisms over equity corrections, the study found that detective and corrective controls are functioning reasonably well through a tiered mechanism, internal reconciliations, and accounting system utilization. However, preventive controls remain weak, as potential corrections are often only identified near the end of the reporting process.

Keywords : Equity Correction, Materiality, Financial Statements of Local Government, SAP

RINGKASAN TESIS

ANALISIS DAN IMPLIKASI KOREKSI EKUITAS PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH : STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

1. Latar Belakang

Pelaporan keuangan di sektor publik Indonesia saat ini mengalami berbagai tantangan dimana Pemerintah Daerah diharapkan mampu menyusun laporan keuangan yang berkualitas guna meningkatkan rasa percaya masyarakat. Opini WTP yang diraih pemerintah daerah selama ini dianggap sebagai suatu *prestige* dan tolak ukur keberhasilan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Soufyan, Mahdani, dan Wahyuni 2024). Hal ini membuat pemerintah daerah semakin berupaya untuk meningkatkan kualitas laporannya. Penyajian informasi pada laporan keuangan wajib memenuhi syarat bebas dari pengertian yang salah maupun salah saji (Kapriana dan Agung 2020). Laporan keuangan yang telah diaudit digunakan untuk pengambilan keputusan sehingga apabila sesuatu laporan mengandung salah saji, maka kesalahan dalam pengambilan keputusan akan mungkin terjadi (Angelina dan Wibowo 2024). Kesalahan yang ditemukan dalam penyajian angka di laporan keuangan harus segera diperbaiki (Komang 2024).

Isu terkait kualitas laporan keuangan pemerintah sering diangkat di dalam suatu penelitian, namun selama ini pembahasannya lebih kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya (Handayani, Suartini, dan Fuad 2024). Ketidaksesuaian penyajian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) masih menjadi perhatian BPK RI dalam tahapan pemeriksaan pada seluruh LKPD kabupaten/kota termasuk di wilayah Kalimantan Barat (Mustafa dan Yuliana 2020). Koreksi ekuitas merupakan bagian vital dari pencatatan akuntansi karena dapat mencerminkan kondisi keuangan yang lebih akurat (Febriyanti 2018).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat koreksi signifikan pada saldo ekuitas yang dilaporkan dalam Lapon Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mengindikasikan adanya kesalahan penyajian di tahun-tahun sebelumnya. Pada LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022, terdapat koreksi ekuitas sebesar Rp164.836.311.206,79 atau sekitar 7,5% dari nilai ekuitas akhir tahun sebelumnya. Koreksi ini mencerminkan adanya kesalahan material dalam penyajian informasi keuangan yang berdampak pada keandalan laporan keuangan serta menimbulkan potensi keraguan terhadap validitas opini audit WTP yang telah diberikan.

Pos koreksi ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tidak hanya berkaitan dengan transaksi tahun berjalan, tetapi juga mencakup penyesuaian terhadap kesalahan pencatatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kesalahan tersebut dapat berupa kurang saji/*understated* atau lebih saji/*overstated* (Djunur 2021). Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem pencatatan dan pelaporan atas transaksi koreksi ekuitas pada penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Pentingnya akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan ini mendorong perlunya penelitian terhadap kepatuhan transaksi koreksi ekuitas terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengukuran materialitas atas koreksi ekuitas tersebut baik pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan maupun pada tingkat akun dan implikasinya terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menjadi krusial mengingat besaran koreksi dapat memberikan sinyal negatif terhadap kualitas laporan keuangan serta efektivitas pengendalian internal yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih jauh mengenai pos koreksi ekuitas pada LKPD Kabupaten Kubu Raya dengan fokus pada kepatuhan pos koreksi ekuitas terhadap SAP, pengukuran tingkat materialitas, dan implikasinya terhadap penyajian laporan keuangan daerah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang selanjutnya dilakukan perumusan masalah yang dirangkum dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1) Bagaimana kepatuhan transaksi pembentuk pos koreksi ekuitas pada LPKD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ?
2) Bagaimana pengukuran materialitas pos koreksi ekuitas dapat menyebabkan terjadinya salah saji material tingkat laporan keuangan pada LKPD tahun sebelumnya ?
3) Bagaimana pengukuran materialitas pos koreksi ekuitas dapat menyebabkan terjadinya salah saji material tingkat akun pada LKPD tahun sebelumnya ?
4) Bagaimana implikasi pos koreksi ekuitas terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 ?

3. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah ditentukan dan dijabarkan, maka penelitian ini dilakukan guna :

1) Menganalisis kepatuhan transaksi yang membentuk pos koreksi ekuitas pada LKPD Kabupaten Kubu Raya TA 2022 dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2) Menganalisis pengukuran materialitas pos koreksi ekuitas yang menyebabkan salah saji material tingkat laporan keuangan pada LKPD Kabupaten Kubu Raya tahun sebelumnya.
3) Menganalisis pengukuran materialitas pos koreksi ekuitas yang menyebabkan salah saji material tingkat akun pada pada LKPD Kabupaten Kubu Raya tahun sebelumnya.
4) Menganalisis implikasi pos koreksi ekuitas terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus retrospektif yang dilakukan secara mendalam untuk mengkaji fenomena koreksi ekuitas dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. Penelitian dilaksanakan di BPKAD Kabupaten Kubu Raya selaku entitas pelaporan selama periode Januari hingga Mei 2025 dengan informan jumlah informan sebanyak 5 orang yang dipilih berdasarkan kriteria informan yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan dengan mengacu pada teori yang relevan untuk menjawab keempat rumusan masalah penelitian.

5. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 94 transaksi koreksi ekuitas terdapat 49 transaksi yang memenuhi definisi kesalahan sebagaimana diatur dalam PSAP 10 Revisi 2020, sementara 45 transaksi lainnya tidak memenuhi definisi kesalahan. Pengukuran materialitas secara kuantitatif mengindikasikan bahwa LKPD Kabupaten Kubu Raya tahun 2021 mengalami salah saji material baik pada tingkat laporan keuangan dengan rasio koreksi melebihi ambang batas 3% (11,62% terhadap total pendapatan dan 12,14% terhadap total beban) serta mengalami salah saji material pada tingkat akun neraca yaitu pada akun penyertaan modal pemerintah, akumulasi penyusutan dan utang jangka pendek. Implikasi koreksi ekuitas terhadap laporan keuangan mencerminkan adanya kesalahan pencatatan dan pengakuan pada tahun sebelumnya yang memengaruhi keandalan laporan tahun berjalan. Adapun konsep pengendalian atas transaksi koreksi ekuitas menunjukkan bahwa pengendalian detektif dan korektif telah berjalan cukup baik melalui mekanisme berjenjang, adanya prosedur standar, rekonsiliasi internal dan pemanfaatan sistem akuntansi. Namun, pengendalian preventif dinilai masih lemah karena identifikasi potensi koreksi baru dilakukan menjelang akhir proses pelaporan.

THESIS SUMMARY

ANALYSIS AND IMPLICATIONS OF EQUITY CORRECTION ON THE PRESENTATION OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS : A STUDY ON KUBU RAYA DISTRICT GOVERNMENT

1. Background

Financial reporting in the Indonesian public sector is currently experiencing various challenges where local governments are expected to be able to prepare quality financial reports in order to increase public trust. The WTP opinion achieved by the local government has been considered a *prestige* and a measure of success in realizing financial management accountability (Soufyan, Mahdani, and Wahyuni 2024) . This makes local governments increasingly strive to improve the quality of their reports. The presentation of information in the financial statements must meet the requirements of being free from false understanding or misstatement (Kapriana and Agung 2020) . Audited financial reports are used for decision making so that if a report contains misstatements, then errors in decision making will likely occur (Angelina and Wibowo 2024) . Errors found in the presentation of numbers in the financial statements must be corrected immediately (Komang 2024) .

Issues related to the quality of government financial reports are often raised in a study, but so far the discussion is more about the factors that influence it (Handayani, Suartini, and Fuad 2024) . Presentation discrepancies with Government Accounting Standards (SAP) are still a concern of BPK RI in the examination stage of all LKPDs in districts / cities including in the West Kalimantan region (Mustafa and Yuliana 2020) . Correction of equity is a vital part of accounting records because it can reflect more accurate financial conditions (Febriyanti 2018) .

Facts in the field show that there are still significant corrections to the equity balance reported in the Local Government Financial Report (LKPD) which indicate misstatements

in previous years. In the LKPD of Kubu Raya Regency for the 2022 Fiscal Year, there was an equity correction of Rp164,836,311,206.79 or around 7.5% of the previous year's final equity value. This correction reflects a material error in the presentation of financial information that has an impact on the reliability of the financial statements and raises potential doubts about the validity of the WTP audit opinion that has been given.

Equity correction items in the Statement of Changes in Equity (LPE) are not only related to current year transactions, but also include adjustments to recording errors from previous years. These errors can be in the form of *under-statement/understated* or *over-statement/overstated* (Djunur 2021) . This shows the need for an in-depth evaluation of the recording and reporting system for equity correction transactions in the presentation of the financial statements of the Kubu Raya Regency Government.

The importance of accountability in the presentation of financial statements encourages the need for research into the compliance of equity correction transactions with Government Accounting Standards (SAP), measurement of the materiality of the equity correction both at the level of the financial statements as a whole and at the account level and its implications for the presentation of local government financial statements. This is crucial considering that the amount of correction can give a negative signal to the quality of financial statements and the effectiveness of internal control owned by local governments.

Based on this phenomenon, this study aims to further analyze the equity correction post in the LKPD of Kubu Raya Regency with a focus on the compliance of the equity correction post with SAP, measurement of the materiality level, and its implications for the presentation of regional financial statements.

2. Problem Formulation

Based on the background exposure, the problem formulation is then carried out which is summarized in the form of research questions as follows:

1) How is the compliance of transactions forming the equity correction post in the Kubu Raya Regency LPKD in 2022 with Government Accounting Standards (SAP) ?
2) How is the measurement of materiality of equity correction items that can cause material misstatement at the financial statement level in the previous year's LKPD ?
3) How is the measurement of materiality of equity correction items that can cause account-level material misstatement in the previous year's LKPD ?
4) What are the implications of equity correction items for the presentation of the financial statements of the Kubu Raya Regency Government in 2022 ?

3. Research Objectives

As the formulation of the problem that has been determined and described, this research was conducted in order to:

1) Analyzing the compliance of transactions that form the equity correction post in the LKPD of Kubu Raya Regency FY 2022 with Government Accounting Standards (SAP).
2) Analyzing the materiality measurement of equity correction items that cause material misstatement at the financial statement level in the LKPD of Kubu Raya Regency in the previous year.
3) Analyzing the materiality measurement of equity correction items that cause account-level material misstatement in the LKPD of Kubu Raya Regency in the previous year.
4) Analyze the implications of equity correction items on the presentation of the financial statements of the Kubu Raya Regency Government in 2022.

4. Research Methods

This research uses a qualitative approach with a retrospective case study method conducted in depth to examine the phenomenon of equity correction in the financial statements of the Kubu Raya Regency Regional Government. The research was conducted at BPKAD Kubu Raya Regency as the reporting entity during the period January to May 2025 with 5 informants selected based on predetermined informant criteria. Data collection techniques consist of interviews, observations, and documentation, while data analysis is carried out through the stages of collection, reduction, presentation of data, and drawing conclusions by referring to relevant theories to answer the four research problem formulations.

5. Research Results

The results showed that of the 94 equity correction transactions, 49 transactions met the definition of error as stipulated in PSAP 10 Revised 2020, while the other 45 transactions did not meet the definition of error. Quantitative measurement of materiality indicates that the Kubu Raya Regency LKPD in 2021 experienced material misstatements both at the financial statement level with a correction ratio exceeding the 3% threshold (11.62% of total revenue and 12.14% of total expenses) and experienced material misstatements at the balance sheet account level, namely in the government equity participation account, accumulated depreciation and short-term debt. The implications of equity corrections on financial statements reflect recording and recognition errors in the previous year that affect the reliability of the current year's report. The concept of control over equity correction transactions shows that detective and corrective controls have run quite well through tiered mechanisms, standard procedures, internal reconciliation and utilization of accounting systems. However, preventive control is considered weak because the identification of potential corrections is only carried out towards the end of the reporting process.

DAFTAR ISI

JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT ..... **ii**
PERTANGGUNGJAWABAN TESIS ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
UCAPAN TERIMAKASIH ..... **v**
ABSTRAK / *ABSTRACT* ..... **vii**
RINGKASAN TESIS ..... **ix**
TESHIS SUMMARY ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
DAFTAR TABEL ..... **xxi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xxiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Kontribusi Penelitian 5
1.4.1 Kontribusi Teoritis 5
1.4.2 Kontribusi Praktis 6
1.5 Gambaran Kontekstual Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **7**
2.1. Landasan Teori 7
2.1.1. Teori Kepatuhan 7
2.1.2. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah 8
2.1.3. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya 8
2.1.4. Koreksi Ekuitas 9
2.1.5. Kriteria Pengakuan Koreksi Ekuitas 10

2.1.6. Materialitas 11
2.1.7. Salah Saji Material Tingkat Laporan Keuangan 12
2.1.8. Salah Saji Material Tingkat Akun 13
2.1.9. Implikasi Koreksi Ekuitas 15
2.2. Kajian Empiris 16
2.3. Kerangka Konseptual 21

BAB III METODE PENELITIAN 22
3.1 Bentuk Penelitian 22
3.2 Pendekatan Studi Kasus 22
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 23
3.4 Kriteria Pemilihan Informan 24
3.5 Data 25
3.5.1. Data Primer 25
3.5.2. Data Sekunder 26
3.6 Teknik Pengumpulan Data 27
3.6.1. Wawancara Mendalam (*in-dept interview*) 27
3.6.2. Observasi 28
3.6.3. Dokumentasi 28
3.7 Metode Analisis Data 29
3.7.1. Pengumpulan Data *(Data Collection)* 29
3.7.2. Reduksi Data *(Data Reduction)* 30
3.7.3. Penyajian Data (*Data Display*) 32
3.7.3.1. Coding Data 33
3.7.3.2. Analisis Data 33
3.7.4. Penarikan Kesimpulan (*Conslusion Drawing*) 33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 36
4.1 Objek Penelitian 36
4.2 Hasil Penelitian 36
4.2.1. Data Hasil Penelitian 36

4.3 Pembahasan 64
4.3.1 Analisis Kepatuhan Pos Koreksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 64
4.3.1.1. Kategori Kesalahan 65
4.3.1.2. Kategori Bukan Kesalahan 69
4.3.2 Analisis pengukuran materialitas pos koreksi ekuitas dalam salah saji material tingkat laporan keuangan 73
4.3.3. Analisis pengukuran materialiyas pos koreksi ekuits dalam salah saji material tingkat akun 75
4.3.4. Analisis Implikasi Pos Koreksi Ekuitas Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya 81
4.3.4.1. Analisis Implikasi Konsep Pengendalian Preventif Pada Pos Koreksi Ekuitas 82
4.3.4.2. Analisis Implikasi Konsep Pengendalian Detektif Pada Pos Koreksi Ekuitas 85
4.3.4.3. Analisis Implikasi Konsep Pengendalian Korektif Pada Pos Koreksi Ekuitas 88

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 93
5.1 Kesimpulan 93
5.2 Implikasi 94
5.2.1. Implikasi Praktis 94
5.2.2. Implikasi Teoritis 95
5.3. Keterbatasan Penelitian 96
5.4. Saran dan Rekomendasi 96
DAFTAR PUSTAKA **98**
LAMPIRAN 1 Pedoman Wawancara **104**
LAMPIRAN 2 Reduksi Data Transaksi Pos Koreksi Ekuitas **109**
LAMPIRAN 3 Dokumentasi Proses Wawancara **118**
LAMPIRAN 4 Form Usulan LPE LKPD Kabupaten Kubu Raya **121**

LAMPIRAN 5 *Face Off* LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 ..... **122**
LAMPIRAN 6 CALK LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 ..... **126**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 LPE LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 3

Tabel 2.1 Panduan Jurnal Koreksi Kesalahan Menurut PSAP No. 10 Revisi 2020 10

Tabel 2.2 Dasar Penetapan Nilai Materialitas 14

Tabel 2.3 Alternatif Hubungan Antara Opini Tahun Sebelumnya, AR, Tingkat Materialitas Awal dan Faktor Kualitatif..... 14

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu..... 17

Tabel 3.1 Waktu Penelitian..... 23

Tabel 3.2 Kriteria Informan 24

Tabel 3.3 Jumlah Informan dan Akun Koreksi 25

Tabel 3.4 Implikasi Tema Wawancara 27

Tabel 3.5 Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data 29

Tabel 3.6 Tahap Reduksi Data 31

Tabel 4.1 Data Koreksi Ekuitas LPE LKPD Kabupaten Kubu Raya 37

Tabel 4.2 Data Informan Penelitian 37

Tabel 4.3 Transkrip Wawancara Informan 1 38

Tabel 4.4 Transkrip Wawancara Informan 2..... 42

Tabel 4.5 Transkrip Wawancara Informan 3..... 45

Tabel 4.6 Transkrip Wawancara Informan 4..... 47

Tabel 4.7 Transkrip Wawancara Informan 5..... 50

Tabel 4.8 Reduksi Data Wawancara 52

Tabel 4.9 Coding Data Wawancara 63

Tabel 4.10 Kategori Transaksi Koreksi 65

Tabel 4.11 Pengukuran Materialitas Koreksi Ekuitas Tingkat Laporan Keuangan 74

Tabel 4.12 Pengukuran Materialitas Koreksi Ekuitas Tingkat Akun Neraca 76

Tabel 4.13 Pengukuran Materialitas Koreksi Ekuitas Tingkat Akun LO 78

Tabel 4.14 Pengukuran Materialitas Koreksi Ekuitas Tingkat Akun LRA 79

Tabel 4.15 *Gap* Akun Koreksi dan Batasan Materialitas 81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 21

Gambar 3.1 Analisis Data Kualitatif menurut Miles dan Huberman 34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 39

Lampiran 2 Reduksi Data Transaksi Pos Koreksi Ekuitas..... 109

Lampiran 3 Dokumentasi Proses Wawancara..... 118

Lampiran 4 Form Usulan LPE LKPD Kabupaten Kubu Raya 121

Lampiran 5 *Face Off* LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022..... 122

Lampiran 6 CALK LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 126

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kini, pelaporan keuangan di sektor publik Indonesia mengalami berbagai tantangan. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menyusun laporan keuangan yang berkualitas guna meningkatkan rasa percaya masyarakat. Opini WTP yang diraih pemerintah daerah selama ini dianggap sebagai suatu *prestige* dan tolak ukur keberhasilan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Soufyan, Mahdani, dan Wahyuni 2024). Hal ini membuat pemerintah daerah semakin berupaya untuk meningkatkan kualitas laporannya. Penyajian informasi pada laporan keuangan wajib memenuhi syarat bebas dari pengertian yang salah maupun salah saji (Kapriana dan Agung 2020). Laporan keuangan yang telah diaudit digunakan untuk pengambilan keputusan sehingga apabila sesuatu laporan mengandung salah saji, maka kesalahan dalam pengambilan keputusan akan mungkin terjadi (Angelina dan Wibowo 2024). Kesalahan yang ditemukan dalam penyajian angka di laporan keuangan harus segera diperbaiki (Komang 2024).

Isu terkait kualitas laporan keuangan pemerintah sering diangkat di dalam suatu penelitian, namun selama ini pembahasannya lebih kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya (Handayani, Suartini, dan Fuad 2024). Isu salah saji menjadi atensi khusus bagi pada penelti dalam hal melakukan pengujian secara substantif terhadap kehandalan laporan keuangan pemerintah. Ketidaksesuaian penyajian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) masih menjadi perhatian BPK RI dalam tahapan pemeriksaan pada seluruh LKPD kabupaten/kota termasuk di wilayah Kalimantan Barat (Mustafa dan Yuliana 2020). Nilai salah saji yang material akan mempengaruhi relevansi dan keandalan laporan keuangan. Penetapan batas materialitas ada pada setiap tahapan akuntansi dan pemeriksaan sehingga penting untuk memastikan bahwa pengguna laporan keuangan dapat memahami sebab akibat dari perubahan informasi yang terjadi di dalam laporan keuangan (Purba, Umar, dan Pramana. Silvia 2019). Adanya koreksi pada laporan

keuangan adalah bentuk *treatment* khusus dari gejala-gejala kerancuan dan ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan.

Koreksi ekuitas merupakan bagian vital dari pencatatan akuntansi karena dapat mencerminkan kondisi keuangan yang lebih akurat (Febriyanti 2018). Koreksi ekuitas yang disajikan di dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tidak hanya terkait dengan transaksi di tahun berjalan, namun juga transaksi pada tahun sebelumnya. Informasi yang tercantum pada pos koreksi ekuitas mengindikasikan bahwasannya saldo akhir ekuitas di neraca di tahun sebelumnya tidak akurat yang mana didalam konteks akuntansi disebut sebagai kesalahan pelaporan (kurang saji/*understated* atau *lebih saji/overstated*) (Djunur 2021). Koreksi ekuitas dalam laporan keuangan berkaitan dengan penyesuaian yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang memengaruhi posisi ekuitas entitas tersebut. Koreksi dapat berasal dari berbagai sumber, seperti kesalahan mendasar di periode sebelumnya dan perubahan kebijakan akuntansi. Penyajian koreksi ekuitas harus transparan dan mencakup penjelasan tentang jenis koreksi dan dampaknya pada laporan keuangan.

Laporan Perubahan Ekuitas Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk tahun 2022 mencatat ekuitas awal dan akhir selama tahun tersebut. Ekuitas awal di tahun 2022 adalah sebesar Rp2.193.506.625.850,26, yang merupakan saldo ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit. Koreksi ekuitas ini diungkapkan ke dalam CALK LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022. Di dalam CALK LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 ada sebanyak 94 data transaksi yang membentuk pos koreksi ekuitas. Jumlah koreksi kesalahan tersebut terbentuk dari koreksi ekuitas transaksi dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu. Beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu berperan sebagai entitas akuntansi, sedangkan entitas yang bertanggung jawab dalam pelaporan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya. Informasi Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya ada tabel berikut :

Tabel 1.1
LPE LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas Awal	**2,193,506,625,850.26**	**2,035,295,456,885.56**
Surplus/Defisit-LO	**65,550,340,893.56**	**1,155,369,077.16**
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi /	**(164,836,311,206.79)**	**157,055,799,887.54**
Kesalahan Mendasar :		
Koreksi Ekuitas Kas dan Setara Kas	(64,272,564.42)	-
Koreksi Ekuitas Piutang	(6,719,032.00)	-
Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang	347,754,414.14	
Koreksi Ekuitas Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1,078,547,174.46	-
Koreksi Ekuitas Tanah	1,668,898,000.00	-
Koreksi Ekuitas Peralatan dan Mesin	0.60	-
Koreksi Ekuitas Gedung dan Bangunan	13,520,069.36	-
Koreksi Ekuitas Jalan dan Irigasi	(8.17)	-
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan	(163,719,039,260.76)	-
Koreksi Ekuitas Utang Jangka Pendek	(4,155,000,000.00)	-
Lain-Lain		157,055,799,887.54
Ekuitas Akhir	**2,094,220,655,537.03**	**2,193,506,625,850.26**

Sumber : LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022

Berdasarkan uraian data di atas, dapat dilihat bahwa total koreksi ekuitas senilai minus Rp. 164.836.311.206,79. Pada tahun 2021 nilai koreksi ekuitas senilai Rp.157.055.799.887,5. Hal ini mengakibatkan saldo akhir ekuitas pada tahun 2022 turun menjadi Rp.2.094.220.655.537,03. Koreksi ekuitas tahun 2022 jika dibanding dengan nilai ekuitas akhir TA 2021 yang senilai Rp.2.193.506.625.850,26, maka rasio koreksi yang diperoleh sebesar 7,50%. Rasio ini mengindikasikan nilai ekuitas akhir TA 2021 tidak akurat sehingga harus dilakukan koreksi yang disajikan di dalam laporan ekuitas pada tahun 2022.

Nilai koreksi ekuitas yang signifikan akan mempengaruhi kehandalan laporan keuangan pemerintah daerah di tahun sebelumnya. Jika LKPD Kabupaten Kubu Raya TA 2021 mendapat opini WTP, nilai koreksi ekuitas akan memberikan persepsi kontradiktif bagi pengguna LKPD Kabupaten Kubu Raya. Di dalam artikel yang termuat pada Majalah KSAP yang terbit pada 1 Desember 2020 dengan judul "Akuntansi Berlaku Surut" seorang tokoh akuntansi di Indonesia Dr Jan Hoesada (KSAP) menyatakan bahwa tidak ada kewajiban

menyajikan ulang laporan keuangan pemerintahan yang telah dimuat di dalam Berita Negara karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap opini BPK. Negara menetapkan *Accountability Day*, yang sebenarnya adalah strategi jahit-mati dan anti-*restatement* dari penyajian LKPP/LKPD (Hoesada n.d.).

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 4, penyajian ulang laporan keuangan secara retrospektif tidak diperbolehkan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. KSAP berpendapat bahwa penerapan restatement laporan keuangan secara retrospektif dianggap kurang praktis, karena laporan keuangan yang sudah disetujui untuk diterbitkan telah dipertanggungjawabkan melalui UU atau Perda. Hal ini tentu menjadi pertanyaan akan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima pemerintah daerah apakah bebas dari kesalahan material, dengan adanya koreksi ekuitas yang terjadi pada tahun berjalan. Menanggapi fenomena tersebut, maka perlu dilakukan analisis mendalam terhadap koreksi ekuitas dan implikasinya pada penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian berjudul **"Analisis dan Implikasi Koreksi Ekuitas Pada Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya"**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, selanjutnya dilakukan perumusan masalah yang dirangkum dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1) Bagaimana kepatuhan transaksi pembentuk pos koreksi ekuitas pada LPKD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ?
2) Bagaimana pengukuran materialitas pos koreksi ekuitas dapat menyebabkan terjadinya salah saji material tingkat laporan keuangan pada LKPD tahun sebelumnya ?
3) Bagaimana pengukuran materialitas pos koreksi ekuitas dapat menyebabkan terjadinya salah saji material tingkat akun pada LKPD tahun sebelumnya ?

4) Bagaimana implikasi pos koreksi ekuitas terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 ?

1.3.Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah ditentukan dan dijabarkan, maka penelitian ini dilakukan guna :

1) Menganalisis kepatuhan transaksi yang membentuk pos koreksi ekuitas pada LKPD Kabupaten Kubu Raya TA 2022 dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2) Menganalisis pengukuran materialitas pos koreksi ekuitas yang menyebabkan salah saji material tingkat laporan keuangan pada LKPD Kabupaten Kubu Raya tahun sebelumnya.
3) Menganalisis pengukuran materialitas pos koreksi ekuitas yang menyebabkan salah saji material tingkat akun pada pada LKPD Kabupaten Kubu Raya tahun sebelumnya.
4) Menganalisis implikasi pos koreksi ekuitas terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022.

1.4.Kontribusi Penelitian

1.4.1. Kontribusi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan menginformasikan dan menjawab pertanyaan tentang pos koreksi ekuitas dan berimplikasi pada penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini nantinya akan memberikan kontribusi teoritis berupa argumen yang mendalam atas kajian literatur yang relevan dalam rangka memperluas pemahaman terhadap teori yang ada. Disisi lain, Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta memberikan wawasan baru mengenai perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang analisis koreksi ekuitas dan implikasinya pada penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4.2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat secara praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kontribusi ini ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi dan referensi dalam pembuatan laporan keuangan yang selaras dengan SAP yang berlaku. Hasil penelitian dapat digunakan dalam situasi dunia nyata untuk menawarkan solusi dan rekomendasi yang dapat digunakan oleh praktisi sebagai bahan pengambilan keputusan.

1.5.Gambaran Kontekstual Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2022 dan 2021 yang telah diaudit. Penelitian dilaksanakan di BPKAD Kubu Raya yang bertanggung jawab sebagai entitas pelaporan dan sekaligus sebagai konsolidator LKPD Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran analisis atas koreksi ekuitas dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, namun juga wacana ilmiah untuk penelitian selanjutnya yang relevan.